

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Islam

Kepemimpinan di suatu negara tidak lagi hanya diisi oleh kaum laki-laki. Geliat politik perempuan mulai ikut andil dalam percaturan kepemimpinan pada suatu negara. Kepemimpinan perempuan yang bentuknya bervariasi baik itu kepala negara maupun kepala pemerintahan tingkat bawah seperti gubernur, bupati dan wali kota. Munculnya perempuan sebagai pilihan pemimpin, terbukti dengan terpilihnya perempuan menjadi kepala negara, perdana menteri hingga kepala desa. Contohnya Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto, ia merupakan perdana Menteri selama dua periode, mulai tahun 1988-1990, dan periode kedua tahun 1993-1996. Lalu di Bangladesh juga terdapat dua pemimpin perempuan yaitu Khaleda Zia dan Sheik Hasina, sedangkan di Myanmar terdapat pemimpin perempuan yang tangguh yakni Aung San Suu Kyi.¹ Di Indonesia ada nama-nama seperti Megawati, Tri Rismaharini, Khofifah dan tokoh-tokoh perempuan lain yang pernah menduduki jabatan strategis di negeri ini.

Pemimpin dalam pandangan Islam sendiri, tidak pernah secara spesifik menuntut keharusan laki-laki ataupun perempuan tanpa bermaksud menghapus perdebatan panjang dari berbagai tokoh ulama mengenai kriteria pemimpin antara laki-laki dan perempuan. Sepatutnya, selama seorang pemimpin dapat menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dengan sebaik mungkin, termasuk menyejahterakan rakyat dan berbuat adil, maka ia merupakan pemimpin sejati. Anggapan-anggapan yang mengerdilkan perempuan sebagai sosok pemimpin selain lazimnya laki-laki, tampaknya tidak relevan lagi di era kepemimpinan kontemporer. Apalagi, banyak ditemui kasus korupsi, penyelewengan jabatan dan sebagainya, menysar tokoh-tokoh pemimpin dari kaum laki-laki. Pun sebaliknya, beberapa kasus juga mendera tokoh-tokoh pemimpin dari kalangan perempuan. Hal ini secara tegas dapat memberikan gambaran bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kecenderungan yang sama dalam memimpin. Mereka dapat menjadi pemimpin yang baik bagi rakyatnya, atau bahkan sebaliknya.

¹ Hendri Saputra, "Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan", 48.

Islam sebagai perangkat hidup yang mengatur umat manusia dalam beragama dan bernegara melalui Al-Qur'an dan perkataan serta perilaku nabi (hadis) memilih seorang pemimpin berdasarkan kriteria yang telah diatur di dalam syariat Islam. Di sisi lain, mempelajari terlebih dahulu kiprah dan kemampuan seorang calon pemimpin merupakan hal mutlak untuk dilakukan. Di sinilah kita sepakat bahwa ilmu pengetahuan dan kebudayaan merupakan hal penting yang harus dikuasai rakyat sebelum memilih pemimpin.

Kepemimpinan laki-laki tidak dapat menjamin kesejahteraan rakyat, sebab faktanya penyalahgunaan jabatan politik untuk korupsi, mempertahankan kekuasaan dan sebagainya masih sering dijumpai pada pemimpin laki-laki. Begitu juga halnya dengan kepemimpinan perempuan, banyak juga yang berbuat sama. Segala kemungkinan-kemungkinan penyelewengan kekuasaan bisa saja terjadi, karena manusia baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diliputi godaan-godaan kekuasaan, sehingga alangkah lebih baik jika pemimpin selalu mendekati diri pada Allah dan berintrospeksi.

Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad tidak mewasiatkan untuk mendirikan negara Islam, juga tidak memberikan isyarat untuk memilih pemimpin setelahnya, apakah perempuan atau laki-laki. Di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan juga sistem negara yang baku, sehingga permasalahan politik merupakan bagian proses kebebasan individu sebagai media untuk mencapai kemaslahatan umat. Artinya, siapa pun bebas untuk terjun ke dunia politik dengan memenuhi syarat-syarat dan berpedoman teguh kepada Al-Qur'an serta Sunah. Seperti pada firman Allah dalam Al-Qur'an: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*.² Berdasarkan ayat tersebut, dengan jelas bahwa Allah telah berpesan kepada siapa saja penerima amanat, agar berbuat adil. Hal ini tidak terlepas dari perihal kepemimpinan. Sebab laku kepemimpinan telah diajarkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya.

Kepemimpinan perempuan menjadi kontroversi dalam tinjauan syariah Islam karena ada perbedaan ulama tentang hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari:

² QS: An Nissa / 4 : 58

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ
 قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ) رواه البخاري والنسائي والترمذي واحمد

Artinya: Dari Abu Bakrah Ra ia berkata: “Allah telah memeliharaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW, Saat Kisra hancur, beliau bertanya: Siapa yang mereka angkat sebagai raja? Para sahabat menjawab, Puterinya. Beliau lalu bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang perempuan.” (HR. Bukhari).³

Secara tekstual, hadis Nabi Muhammad SAW. di atas berisi tentang penolakan terhadap kepemimpinan perempuan. Akan tetapi, secara kontekstual, sesuai dengan *asbaab al-wuruud*-nya, hadis Nabi ini muncul ketika terjadi pertikaian dan konflik antar elit politik melanda Persia. Titik kehancuran Persia sudah terlihat di depan mata. Pada saat itu, seorang pemimpin perempuan muncul untuk mengurus dan menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi, pemimpin tersebut tidak kompeten dalam memimpin, sehingga muncul pandangan Nabi Muhammad SAW. mengenai kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan tidak akan beruntung. Artinya, pernyataan penolakan tersebut bukan didasarkan pada jenis kelamin, melainkan sebab kapabilitas seorang pemimpin, di mana hal ini juga dapat dialami oleh pemimpin dari kaum laki-laki.⁴ Meski hadis tersebut dianggap oleh berbagai kalangan sebagai alat untuk meminggirkan peran perempuan dalam bidang kepemimpinan. Di sisi lain, Ada juga kalangan yang menolak penggunaan hadis tersebut dengan alasan bahwa perempuan berhak terjun sebagai pemimpin. Menurut Muhammad Al-Ghazali hadis tersebut secara spesifik ditunjukkan kepada Ratu Kisra di Persia dan tidak berlaku umum. Oleh karena itu, pemahaman hadis harus selalu diintegrasikan dengan ayat-ayat Al-Qur’an.⁵ Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Said Aqil Siraj. Ia mengatakan bahwa pemahaman

³ Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 56.

⁴ Fatimah Mernissi, *Setara di Hadapan Allah* (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995), 212.

⁵ Afwan Faizan, *Metode Fuqoha Dalam Memahami Hadis (Studi Pendekatan Yusuf Qardhawi)* Vol. 8, No. 2 (September, 2006), 137.

terhadap hadis di atas tidak bisa tanpa terlebih dahulu memahami ayat Al-Qur'an. Said Aqil Siraj mempertegas bahwa dalam Al-Qur'an, Allah mengabadikan kepemimpinan perempuan di masa Nabi Sulaiman yaitu Ratu Bilqis yang memimpin Negeri Saba'. Negeri ini disebut dalam Al-Qur'an, negeri yang adil, makmur, aman dan sentosa. Walaupun Ratus Bilqis seorang perempuan, tetapi dia punya kemampuan dalam memimpin negerinya menuju kemakmuran.⁶ Meskipun demikian, keberadaan hadis di atas sering kali disalahartikan bahwa suatu kepemimpinan hanya dimiliki oleh laki-laki sedangkan perempuan harus mengakui kepemimpinan tersebut.⁷

Kondisi kepemimpinan semacam ini makin parah ketika konsep emansipasi perempuan masih banyak ditentang oleh beberapa lapisan masyarakat. Padahal, keadilan serta hak asasi manusia pada dasarnya telah menjadi prinsip kehidupan pada umat Islam. Ajaran Islam telah memberikan tempat setara antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan sejarah, datangnya Islam di tengah-tengah dekadensi moral, di mana perempuan tidak dianggap seperti selayaknya manusia. Kisah ini diceritakan dalam Al-Qur'an Az Zuhruf/43:17 yakni:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا
وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya: *“Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa (kelahiran anak perempuan) yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi (Allah) Yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat, karena menahan sedih (dan marah)”*.⁸

Maksud ayat ini ialah bilamana dia diberi kabar tentang kelahiran anaknya yang perempuan, mukanya menjadi merah padam karena malu dan dia amat marah, padahal dia sendiri mengatakan bahwa Allah mempunyai anak perempuan. Maka Islam datang, kemudian menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

⁶ Said Aqil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* (Jakarta: SAS Foundation), 251.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Cet. 17, (Bandung: Mizan, 2013), 313.

⁸ Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*

Konsep kepemimpinan dalam Islam telah diatur sedemikian rupa melalui Al-Quran dan Hadis. Selain itu, para ulama juga bersepakat untuk saling bermusyawarah apabila mengalami kebuntuan ketika menentukan suatu konsep atau hukum dalam bermasyarakat. Termasuk menentukan kriteria pemimpin dalam pandangan Islam. Kita ketahui sendiri bahwa Allah SWT telah memberikan pedoman melalui ayat-ayat Al-Qur'an serta nabi (hadis) bagaimana cara memilih pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan mempunyai beberapa prinsip yang tercantum di dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Prinsip Tanggung Jawab

Ajaran Islam menyatakan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Tanggung jawab merupakan esensi mendasar yang harus diketahui terlebih dahulu oleh setiap orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin untuk menjaga amanah dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat agar tidak sia-sia. Hal ini dijelaskan dalam QS. An- Nisa' [4]: 58.

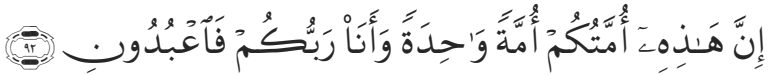
﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaik-an amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*⁹

2. Prinsip Tauhid

Agama Islam menyerukan kepada manusia untuk menuju kepada arah kesatuan akidah yang dapat diterima oleh semua golongan, yaitu tauhid. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Anbiya' [21] : 92

⁹ Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 118.



Artinya: “*Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku*”.¹⁰

3. Prinsip Musyawarah

Prinsip seorang pemimpin di dalam Al-Qur’an, salah satunya yaitu wajib melakukan musyawarah dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan berpandangan baik. Hal tersebut terkandung pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Syura [41]: 38 yaitu: “*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka*”.¹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah orang yang tidak serta merta memutuskan penyelesaian dengan pertimbangan akal sendiri, namun mengajak orang-orang yang berilmu dan berpandangan luas untuk bermusyawarah dalam rangka mencari solusi terbaik suatu masalah.

4. Prinsip Adil

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, seorang pemimpin memiliki “pancaran” keadilan merupakan hal yang sangat penting. Keadilan merupakan suatu “rumusan” perlakuan seorang pemimpin terhadap untuk tidak membedakan, memihak, berat sebelah dalam melayani kepentingan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Maidah [5]: 8, yaitu: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”¹²

Berdasarkan empat prinsip kepemimpinan di atas, tidak

¹⁰ Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967), *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 468.

¹¹ Abdullah ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, 286.

¹² Abdullah ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, 287.

sekalipun disebutkan bahwa pemimpin harus berasal dari laki-laki ataupun perempuan. Hal ini mempertegas bahwa pemimpin tidak memandang *gender*, namun harus memiliki prinsip tanggung jawab, tauhid, musyawarah dan adil. Di sisi lain, kepribadian serta sikap seorang pemimpin merupakan cerminan nyata baik-buruknya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Islam diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Mencintai kebenaran
Menjadi seorang pemimpin harus mempunyai sikap mencintai kebenaran yang mana itu semua termasuk dalam tingkat keraguan dan ketegasan dalam memimpin.
2. Menjaga amanah
Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, dia harus memiliki sikap menjaga amanah yang mana sikap tersebut harus meliputi kepercayaan dan komitmen yang tetap.
3. Ikhlas dalam mengabdikan
Tingkat pengabdian seseorang pemimpin dapat dilihat dari berapa ikhlasnya dalam mengabdikan dan bagaimana sikap ramah-tamah dalam memimpin.
4. Baik dalam pergaulan
5. Kebijaksanaan¹³

Indikator kepemimpinan di atas dapat digunakan untuk melihat seberapa baik atau berhasil seorang pemimpin dalam memimpin rakyatnya (kelompok). Baik pemimpin laki-laki maupun perempuan. Termasuk menilai kepemimpinan seorang bupati, wali kota, gubernur, ketua legislatif, presiden dan sebagainya. Sebab di berbagai diskusi mengenai citra kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan, sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Sama-sama dapat berkontribusi lebih terhadap kelompok, rakyat dan bangsanya.

Pemarginalan perempuan dirasakan pertama kali oleh perempuan non muslim yakni Yahudi dan Kristen. Terjadinya nilai dominan laki-laki (patriarki) dan bias gender, maka kemunculan isu gender di dunia Islam diperkirakan pada periode modern mulai tahun 1800 M, yakni ketika dunia Islam telah bersentuhan dengan dunia

56. ¹³Munawir, *Azas Kepemimpinan dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, 2013),

Barat (Eropa).¹⁴ Di Indonesia, Kontroversi pemimpin perempuan sebenarnya sudah mulai berhembus jauh sebelum pemilu 1999. Pro kontra ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari politisi partai yang berbasis Islam maupun dari kalangan non-partai termasuk akademisi, aktivis ormas Islam, bahkan kalangan santri.¹⁵

Berkaitan dengan pro-kontra mengenai kepemimpinan politik perempuan. Terjadilah selisih paham antar para ulama sehingga terbentuk dua kelompok besar. Kelompok-kelompok tersebut sebagian membolehkan dan sebagian lain tidak membolehkan.

1. Ulama yang Tidak Membolehkan Kepemimpinan Perempuan

Perihal kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara, terdapat berbagai kalangan terlebih tokoh Islam mengharamkan. Penolakan ini berdasarkan pada QS. An-Nisa' 4:34 dan hadis dari Abu Bakrah di atas. Hasil dari kedua *nash* tersebut kalangan ahli fiqih salaf, berpendapat bahwa al-Imam harus dipegang seorang laki-laki dan tidak boleh diduduki seorang perempuan. Di antara ulama-ulama yang kontra ini adalah:

a. Ibnu Katsir

Ibnu Katsir, dalam Ismail bin Umar Ad-Dimashqi, Tafsir Ibnu Katsir, hlm. II/293-293, misalnya, menafsirkan QS. An-Nisa 4:34 menyatakan yang artinya: "*Laki-laki adalah pemimpin wanita... karena laki-laki lebih utama dari perempuan. Itulah sebabnya kenabian dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja yang agung; ... begitu juga posisi jabatan hakim dan lainnya... Ibnu Abbas berkata "Laki-laki pemimpin wanita" maksudnya sebagai amir yang harus ditaati oleh wanita"*.¹⁶ Ibnu Katsir mempertegas bahwa laki-laki adalah pemimpin dari kaum perempuan dalam segala aspek jabatan. Hal ini berarti laki-laki lebih utama dan unggul daripada perempuan, sehingga perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin.

b. Ar-Razi

Menurut Ar-Razi dengan pandangan Ibnu Katsir: "*Keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari banyak sisi. Sebagian berupa sifat-sifat faktual sedang sebagian yang lain berupa hukum syariah seperti al-imamah as-kubro dan*

¹⁴ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 56.

¹⁵ Hendri Saputra, "Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan", 50.

¹⁶ Ismail bin Umar Ad-Dimashqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, 293-293.

al-imamah as-sughro, jihad, adzan, dan lain-lain".¹⁷ Di sini terlihat jelas bahwa dominasi laki-laki atas perempuan terjadi akibat alasan faktual dan syariah dari berbagai sudut sisi kehidupan beragama dan bermasyarakat. Mengenai hal tersebut, Ar-Razi sependapat dengan pandangan Ibnu Katsir.

c. Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengutip ijmak ulama bahwa laki-laki (*dzukuroh*) merupakan salah satu syarat menjadi imam. Kenapa harus laki-laki sebagai syarat jabatan *al-Imam*, karena kemampuan besar harus dimiliki untuk menanggung beban pekerjaan, di mana perempuan dianggap tidak mampu memenuhinya. Perempuan juga tidak sanggup mengemban tanggung jawab yang timbul atas jabatan ini dalam masa damai atau perang dan situasi berbahaya. Nabi bersabda: "*Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita*". Oleh karena itu, ulama fiqih sepakat bahwa jabatan Imam harus laki-laki.¹⁸ Tentu saja yang dimaksud *al-Imam* di sini adalah *Al-Imam Al-Udzma* atau *Al-Khalifah Al-Ammah* yang mengepalai muslim dunia.

2. Ulama yang Membolehkan Kepemimpinan Perempuan

Mengenai perbedaan pendapat antar ulama tentang perempuan menjadi pemimpin, Ibnu Rushd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* telah memerinci perbedaan pandangan tersebut. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya laki-laki sebagai hakim. Juhur mengatakan: "ia menjadi syarat sahnya putusan hukum". Abu Hanifah berkata: "boleh wanita menjadi *qadhi* dalam masalah harta". At-Tabari berkata: "Wanita boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal".¹⁹

Berikut ulama-ulama yang membolehkan jabatan *qadhi* atau hakim diduduki perempuan, antara lain:

a. Muhammad Sayid Thantawi (Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir)

Muhammad Sayid Thantawi berpendapat bahwa jabatan apapun yang dipimpin oleh perempuan tidak bertentangan

¹⁷ Tafsir Al-Fakhrur Razi, 188.

¹⁸ *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 8/302.

¹⁹ Ibnu Rashd, dalam *Bidayatul Mujtahid*, IV/1768.

dengan syariah Islam.²⁰ Baik ketika perempuan sebagai kepala negara (*al-wilayah al-udzma*) ataupun ketika perempuan menduduki jabatan di bawahnya. Thantawi menegaskan di dalam fatwanya yang dikutip majalah Ad-Din wal Hayat, yaitu: “Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba (QS An-Naml 27:23- 44). Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa “*Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita*” Muhammad Sayid berkata bahwa hadis ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum.²¹ Oleh karena itu, perempuan diperbolehkan menjabat sebagai kepala negara, menteri, hakim, anggota legislatif dan sebagainya. Terkecuali jabatan Syaikh Al-Azhar. Sebab jabatan tersebut khusus bagi laki-laki saja. Hal ini karena pada jabatan Syaikh Al-Azhar, berkewajiban menjadi imam salat, di mana secara syariah tidak boleh bagi perempuan.

b. Yusuf Al-Qaradawi

Tidak jauh berbeda dengan apa yang ditegaskan Muhammad Sayid. Yusuf Al-Qaradawi juga menegaskan bahwa perempuan memiliki hak menjabat sebagai kepala negara (*riyasaht daulah*), *mufti*, anggota parlemen, dan sebagainya.²² Perempuan juga memiliki hak memilih dan dipilih. Perempuan berhak berada di posisi apapun, baik dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta. Sikap Islam dalam persoalan ini jelas bahwa Islam menganggap perempuan memiliki kemampuan sempurna (*tamam al ahliyah*).²³

Menurut Qaradawi tidak ada larangan apa pun mengenai perempuan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan yang terdapat pada *nash* Al-Qur’an dan hadis. Akan tetapi,

²⁰ Hendri Saputra, “Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan”, 53

²¹ Hendri Saputra, “Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan”, 53.

²² Yusuf al-Qaradawi, *Bicara Soal Perempuan*, 106.

²³ Abdullah bin Abdul Azin bin Baz, *Majmuk Fatawa Ibn Baz*, no. fatwa: 30461, I/424.

Qaradawi mengingatkan bahwa tetap ada aturan mengenai perempuan yang bekerja di luar rumah sesuai syariah, seperti: a) tidak boleh ada *khalwat* (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, 2) tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, dan 3) harus tetap menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku, dan lain-lain.²⁴

c. Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab (Mufti Mesir)

Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab termasuk ulama berpengaruh yang membolehkan perempuan menjadi kepala negara, hakim, menteri, anggota legislatif, dan sebagainya. Akan tetapi, ia juga sepakat dengan pandangan Yusuf Qaradawi bahwa kedudukan *Al-Imamah Al-Udzma* yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam salat.²⁵

Ali Jumah menegaskan bahwa dalam sejarah Islam suatu kepemimpinan perempuan sudah sering terjadi. Hampir dari 90 perempuan yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di era Khilafah Utsmaniyah. Bagi Ali Jumah, jabatan publik bagi seorang perempuan merupakan keputusan pribadi antara perempuan dan suaminya. Ia menyampaikan bahwa ada beberapa syarat bekerja di luar rumah bagi seorang perempuan. Pertama, pekerjaan itu tidak dilarang dalam syariah Islam. Pekerjaan yang di dalam syariah tidak dibolehkan, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi, terdapat pekerjaan yang diperbolehkan untuk laki-laki namun tidak boleh untuk perempuan. Misalnya, menjadi penari, atau sekretaris pribadi bagi laki-laki yang berada di ruang tertutup. Karena perempuan yang *khalwat* (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lelaki lain tanpa ditemani suami atau mahram hukumnya haram menurut ijmak ulama. Kedua, pekerjaan yang dilakukan perempuan hendaknya tidak meniadakan tugas sejatinya seorang perempuan, yaitu sebagai istri dan ibu. Apabila pekerjaan perempuan tersebut akan mengganggu tugas-tugas utama, maka pekerjaan itu tidak diperkenankan.

²⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Bicara Soal Perempuan*, alih bahasa Tiar Anwar Achtiar, 165.

²⁵ *Harian Al-Jumhuriyah* Mesir, edisi 28 Januari 2007, 23.

Ketiga, tetap berpegang teguh pada etika Islam. Seperti cara berpakaian, berbicara, berjalan, tata cara keluar rumah, dan menjaga sikap-perilakunya. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh keluar tanpa mengenakan busana muslim, atau memakai parfum supaya wanginya tercium laki-laki. Dan tidak boleh berjalan dengan gaya jalan seperti yang digambarkan Allah dalam Al-Qur'an.²⁶

B. Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di Indonesia tahun 2001-2004

Megawati Soekarnoputri merupakan salah satu pemimpin yang hadir dalam sejarah proses kepemimpinan di negeri ini. Ia adalah putri sulung dari Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno. Sama seperti ayahnya, ia dikenal masyarakat sebagai pemimpin karismatik. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh perempuan bermental baja yang berani mendobrak kekuatan politik Orde Baru (Orba).

Dengan tekad yang bulat, Megawati tampil berani menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Dia memasuki area kepemimpinan politik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Dengan keyakinan untuk menegakkan demokrasi dan reformasi di republik ini.²⁷ Hanya sedikit tokoh yang berani bertindak kala itu. Barulah setelah Megawati mengadakan perlawanan terbuka terhadap kekuasaan yang represif, keberanian tokoh-tokoh lainnya mulai ikut bangkit

Megawati Soekarnoputri merupakan Presiden Republik Indonesia ke-5 dengan masa pemerintahan tahun 2001-2004, beliau lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah Wakil Presiden RI yang ke-8 di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid.²⁸ Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama, Soekarno, dengan Ibu Fatmawati. Perempuan bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri ini memulai pendidikannya, dari SD (Sekolah Dasar) hingga SMA (Sekolah Menengah Atas) di Perguruan Cikini, Jakarta. Sementara, ia pernah belajar di dua Universitas, yaitu Fakultas

²⁶ Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), 154-160.

²⁷ "Megawati Soekarnoputri, " dalam Ensiklopedi Tokoh Indonesia, diakses tanggal 10 Januari 2011 dari <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/247-presiden-berkepribadian-kuat?start=1>

²⁸ Kristin Wahyuni, "Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri 2001-2004" (Skripsi, Universitas Sanata Dharma, 2008), 39.

Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972).

Para aktivis dari berbagai elemen yang mendukung pergerakan Megawati berkumpul dan berani berorasi secara bergantian untuk menumpahkan segala kemarahan terhadap penguasa represif di Kantor DPP PDI Jalan Diponegoro, Jakarta. Mereka datang dari berbagai daerah berkumpul di kantor tersebut. Keberanian yang dibayar mahal, karena kantor itu kemudian diserang aparat keamanan dan orang-orang tertentu atas kehendak rezim Orba. Peristiwa 1996 itu, kemudian dikenal dengan sebutan Kudatuli (Kasus 27 Juli).²⁹ Peristiwa tersebut menjadi inspirasi perlawanan terhadap kekuasaan yang cenderung otoriter ketika itu.

Kendati lahir dari keluarga politisi jempolan, Mbak Mega panggilan akrab para pendukungnya, tidak terbilang piawai dalam dunia politik. Bahkan, Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya. Beliau bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik, yakni baru pada tahun 1987.³⁰ Meski demikian, Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI, walau tergolong tidak banyak bicara. Ternyata kondisi seperti ini malah mendongkrak perolehan suara PDI. Megawati pun terpilih menjadi anggota DPR/MPR.

Kiprah kepemimpinan Megawati tampak pada Pemilu 1999. Megawati bukan sekadar ketua partai saja, melainkan seolah-olah sudah menjadi presiden di negeri ini. Bagi pendukung fanatiknya, di dalam sosok Megawati melekat citra atas kejujuran, integritas serta moralitas. Partai yang dipimpin Megawati pun muncul sebagai partai pemenang di antara 47 partai lainnya. PDIP mampu meraup suara hingga 33,76% atau mendapatkan 153 kursi, meskipun tidak menang secara mayoritas mutlak (*single majority*) akan tetapi mayoritas sederhana (*simple majority*). Hal ini yang membuat optimisme para pengurus partai bahwa MPR tinggal mengetuk palunya untuk mengesahkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-4 masa bakti 1999- 2004.³¹

Berbicara mengenai kepemimpinan, di Indonesia hingga saat ini pernah memiliki presiden perempuan pertama dan satu-satunya yaitu Megawati Soekarnoputri. Meski awal dilantik menjadi

²⁹ Julia I Suryakusuma, dkk., *Almanak Parpol Indonesia Pemilu 99'* (Bogor: SMK Grafika Mardi Yuana, 1999), 196.

³⁰ Sumarno, *Megawati Soekarnoputri dari Ibu Rumah Tangga sampai Istana Negara* (Depok: PT Rumpun Dian Nugraha, 2012), 12.

³¹ Sumarno, *Megawati Soekarnoputri dari Ibu Rumah Tangga sampai Istana Negara*, 32.

presiden, Megawati sempat diragukan kemampuannya dalam memimpin suatu negara. Namun, ia membuktikan keraguan terhadap dirinya itu tidak benar. Megawati mampu memimpin dengan baik. Ia juga memperbaiki citra demokrasi Indonesia pasca rezim otoriter Orde Baru. Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil membawa perubahan, melewati krisis multidimensi (yang mengancam gagalnya Indonesia sebagai sebuah bangsa), hingga mampu menghantar Indonesia pada era yang lebih stabil di masa selanjutnya.³²

Koalisi Poros Tengah mempunyai peranan penting dalam kemenangan Megawati Soekarnoputri. Koalisi Poros Tengah merupakan koalisi partai politik yang terbentuk pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Partai politik yang tergolong dalam koalisi tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Koalisi partai-partai Islam ini dibentuk oleh Amien Rais setelah Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) memenangkan pemilu legislatif pada 1999. Latar belakang terjadinya Poros Tengah didorong oleh pemilihan umum (pemilu) bulan Juni 1999 yang dimenangkan oleh PDI-P dengan persentase sebesar 33 persen. Waktu itu, ada kemungkinan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, akan terpilih sebagai presiden dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR). Sedangkan PAN, yang pada Desember 1998 mengumumkan mengusung Amien Rais sebagai calon presiden, hanya mendapat 34 kursi di DPR. Oleh karena itu, pada 7 Oktober 1999, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Amien Rais, membentuk koalisi partai berasaskan Islam. Koalisi yang disebut Poros Tengah itu mengangkat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai calon presiden, yang akan bersaing secara langsung melawan Megawati dan Habibie.³³

Tujuan Poros Tengah adalah untuk mengimbangi atau bahkan menjegal dua lawan yang saat itu menjadi calon presiden Indonesia, yaitu Megawati dan Habibie. Poros Tengah menjadi cara alternatif karena dalam pemilu 1999, tidak ada partai yang menjadi pemenang mutlak. Partai koalisi Poros Tengah Berikut ini partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi Poros Tengah. Partai Kebangkitan

³²Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, *"Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004"*, 53.

³³ Gus Nuril Soko Tunggal, *Ritual Gus Dur dan Rahasia Kewaliannya*, (Yogyakarta: Galangpress, 2010), 35.

Bangsa (PKB) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Keadilan (PK) Partai Bulan Bintang (PBB) Hasil Poros Tengah Pada 20 Oktober 1999, dilakukan pemilihan umum yang dimenangkan oleh Gus Dur dari koalisi Poros Tengah. Poros Tengah mengantarkan Gus Dur sebagai presiden keempat Indonesia dengan perolehan suara sebanyak 373 dalam pemilihan presiden di MPR. Sementara Megawati hanya mendapat perolehan 313 suara, atau menjadi suara kedua terbanyak.

Sebagai bentuk kompromi, Gus Dur berusaha meyakinkan Megawati untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Pada 21 Oktober 1999, Megawati pun resmi terpilih mendampingi Gus Dur sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Tidak hanya itu, Megawati menjadi wakil presiden perempuan pertama di Indonesia. Sedangkan Amien Rais, berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua MPR. Akibat Poros Tengah Pada pertengahan tahun 2000, pemerintahan Gus Dur mulai tidak stabil. Pasalnya, Amien Rais menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Gus Dur dan justru siap berkoalisi dengan PDI-P.³⁴ Amien Rais, yang mengusung Gus Dur, dengan mudah berbalik arah dan turut mendorongnya lengser dari kursi kepresidenan.

Akibatnya, Gus Dur lengser dari kursi kepresidenan lewat Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Sementara Megawati tampil menjadi presiden sampai 2004, begitu pula Amien Rais yang menyelesaikan masa tugasnya hingga 2004. Perkembangan Koalisi Poros Tengah sempat kembali diangkat sewaktu pemilihan umum 2014 akan dilaksanakan. Ada usulan agar partai-partai Islam kembali berkoalisi untuk mengajukan calon presidennya masing-masing dalam melawan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Akan tetapi, Amien Rais mengatakan bahwa peluang untuk koalisi Poros Tengah sudah tidak sebaik sebelumnya. Partai-partai Islam saat itu diakui tidak seakur sedia kala, sehingga kecil kemungkinannya untuk memenangkan pemilu 2014.

Dikeluarkannya memorandum II yang berlanjut dengan digelarnya Sidang Istimewa (SI) MPR RI untuk meminta pertanggungjawaban Presiden KH. Abdurrahman Wahid merupakan suatu peristiwa atau event yang menjadi sumber daya (resources) bagi isi berita media massa, antara bulan Mei sampai menjelang

³⁴ Greg Barton, *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat*, Indonesia President. (Sydney: University of New South Wales, 2017), 44.

01 Agustus 2001. Akan tetapi, karena sesuatu hal, SI diselenggarakan pada 21 Juli 2001. Menarik untuk dicermati dalam kurun waktu tersebut, pemberitaan tentang Wapres Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI, menyusul ditolakannya pertanggungjawaban Presiden KH. Abdurrahman Wahid pada SI MPR RI. Hal ini sudah terlaksana, mengingat sikap Wapres Megawati dan juga sikap partainya (PDIP) yang sudah tidak mau kompromi lagi dengan presiden. Inisiatif Gus Dur gagal mengadakan pertemuan pimpinan parpol di Istana Bogor, 9 Juli 2001, hanya dihadiri oleh Ketua PKB, Matori Abdul Jalil, antara lain, disebabkan oleh pernyataan wapres yang juga Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, di sela acara Lemhanas, bahwa “kita sudah pilih orang” untuk menjadi presiden.

Sebenarnya, kesiapan Megawati menjadi Presiden RI, bukanlah kali ini saja. Tetapi, juga sudah mengemuka sejak Kongres PDIP yang mengantarkan Megawati kembali menjadi Ketua Umum PDIP dan mengamanatkan bahwa calon Presiden RI dari PDIP pasca Pemilu 1999 adalah Megawati Soekarnoputri.³⁵ Ini dibuktikan dengan walk out-nya perjuangan PDIP pada Sidang Umum MPR RI tahun 2000. Sebagai peraih suara terbanyak Pemilu 1999, dengan kursi yang paling banyak di parlemen, sebetulnya F-PPDIP berpeluang besar menjadikan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI, ketika itu. Tetapi, akibat scenario kelompok poros tengah, yang kurang menghendaki Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI, dengan alasan wanita menjadi Presiden masih menjadi perdebatan di antara para ulama, terlebih di negara kita, maka jadilah, ketika itu, KH. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI yang keempat.

Runtuhnya rezim Orde Baru dan munculnya sosok Megawati, telah menumbuhkan kepercayaan di kalangan masyarakat Indonesia bahwa Mega layak tampil sebagai presiden. Selain itu, Mega yang sering di cap mewarisi kharisma bapaknya, Proklamator RI, Ir. Soekarno, yang kemudian menjadi salah satu pemimpin partai politik (PDIP) dan membawa PDIP sebagai pemenang pada Pemilu 1999. Selain berita kemenangan partainya, sejarah tampilnya

³⁵ Aning Sofyan Sadikin, *Presiden Wanita dalam Perspektif Media*, diakses dari: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/download/1112/690>, pada tanggal 08 Juli 2020 pukul 11.03.

megawati ke pentas politikpun, tidak luput mendapat perhatian serius dari media. Hadirnya putri sulung Bung Karno ke pentas politik yang bermula dari perlawanannya menghadapi tirani Orde Baru yang secara logika sulit ditumbangkan, merupakan nilai plus yang meraih simpati rakyat, seperti kasus 27 Juli 1996. Polemik tentang presiden wanita (pro-kontra presiden wanita), menjadikan media massa sebagai ajang perebutan pengaruh, sekaligus juga komoditas politik dalam menyikapi kemungkinan Megawati menjadi presiden wanita pertama di negeri ini

Perlombaan pembentukan opini tentang sah tidaknya wanita menjadi pemimpin negara dalam pandangan Islam yang dilakukan oleh beberapa media massa, mengakibatkan langkah Mega, pasca Pemilu 1999, sesaat tertahan menjadi Presiden, meskipun PDIP sebagai pemenang Pemilu 1999. Tetapi, setelah dikeluarkannya memorandum II yang berlanjut pada rekomendasi Sidang Istimewa MPR RI, peluang Megawati untuk naik menjadi Presiden RI terbuka kembali, walaupun masih ada yang mempersoalkan sah atau tidaknya wanita menjadi Presiden di sebuah negara dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam.

Jika melihat kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di atas, tentu tidak usah diragukan lagi kemampuan dalam memimpin dengan segudang prestasi selama menjadi presiden Indonesia. Megawati memberikan gambaran ideal sebagai seorang pemimpin. Meskipun, eksistensi pemimpin perempuan begitu kurang dibanding keberadaan pemimpin laki-laki.³⁶ Akan tetapi, Megawati menjadi wujud nyata dari keberadaan sosok perempuan sebagai pemimpin.

J.B Kristiadi dari *Centre For Strategic And International Studies* (CSIS) pernah mengomentari tentang keberhasilan Megawati bahwa secara pandangan Jawa, Megawati seperti ratu adil. Sebagai ratu adil masyarakat sangat mengharapkan kepemimpinannya bisa memperbaiki kondisi bangsa yang telah rusak. Megawati merupakan sosok yang pernah hidup dalam lingkungan istana dan mendapatkan pelajaran langsung dari sang ayah. Kini dia harus tampil sebagai ratunya gerakan reformasi. Semula ia memang banyak terlihat sebagai sosok yang pendiam dalam menyikapi berbagai perkembangan reformasi. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa ia kekurangan dan ketinggalan ide. Namun setelah ia mampu membawa partainya memenangi Pemilu pertama dalam era

³⁶Hendri Saputra, "Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan", 60.

reformasi barulah banyak orang yang percaya kepada kematangan dan ketahanannya dalam perpolitikan.³⁷

Rupanya nasib belum seratus persen berpihak pada Megawati, meski pemenang pemilu bukan berarti otomatis dinobatkan menjadi presiden. Karena munculnya kekuatan poros tengah dari PAN, PKB, PK dan PPP yang berhasil mendukung pencalonan Abdurrahman Wahid. Pada sidang paripurna ke-13 MPR RI, melalui voting Gus Dur (panggilan akrab Abdurrahman Wahid) memperoleh 373 suara, sedang Megawati mendapatkan 313. Sehingga Gus Dur yang menjadi presiden.³⁸

Hanya berselang dua tahun, kepemimpinan Presiden Gus Dur goyah, Gus Dur yang diharapkan dapat mengeluarkan negeri ini dari krisis yang berkepanjangan dianggap tak mampu menjalankan harapan reformasi. Banyak kebijakan kontroversial yang tak mampu dipahami banyak pihak. Sehingga konflik dengan parlemen terus terjadi selama pemerintahannya. Pada 23 Juli 2001, MPR mengadakan sidang istimewa yang dipercepat sebagai perlawanan atas Dekrit Presiden Gus Dur yang nekat membubarkan DPR/MPR, kemudian berujung pada jatuhnya Presiden Gus Dur. Melalui SI-MPR itu pula Megawati secara aklamasi dinobatkan menjabat Presiden RI ke-5 periode 2001-2004 menggantikan Presiden Gus Dur.³⁹

Selama negeri dipimpin oleh Presiden Megawati banyak capaian yang didapat di antaranya pemerintah berhasil menekan jumlah penduduk miskin selama tiga tahun terakhir, yaitu dari 18% pada 2002 menjadi 17% pada 2003. Keberhasilan mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke sasaran yang benar, yaitu masyarakat miskin dan petani kecil. Keberhasilan ini juga mendapatkan pujian dari *World Bank*.⁴⁰ Keberhasilan lain dalam bidang ekonomi di antaranya tingkat inflasi rendah, nilai tukar rupiah stabil, cadangan devisa stabil, dan turunnya suku bunga bank, sedang dalam bidang politik pemerintahan Megawati telah meletakkan fondasi yang bagus untuk proses demokratisasi ketatanegaraan di Indonesia. Pada masa pemerintahannya telah

³⁷ Afdal Tanjung, *Maju Tak Gentar PDIP Berkibar* (Jakarta: YPTN, 2000), 9.

³⁸ Hadi Mustafa, "*Kepemimpinan Karismatik: Studi Tentang Kepemimpinan Politik Megawati Soekarnoputri dalam PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 35.

³⁹ Budi, dkk, *Megawati The President*, (Mega Team For The President), 89.

⁴⁰ Hadi Mustafa, "*Kepemimpinan Karismatik: Studi Tentang Kepemimpinan Politik Megawati Soekarnoputri dalam PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*", 35-36.

diselesaikannya amandemen UUD 1945 dengan lancar. Pemerintah juga berhasil melakukan *check and balance* atau menyeimbangkan kedudukan dan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kebebasan pers juga berlangsung seperti harapan banyak pihak.⁴¹

PDIP di bawah kepemimpinan Megawati yang merupakan kelanjutan PDI menjadi pemenang pada Pemilu 1999. Pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hampir tidak ada pemimpin partai yang berani terang-terangan menjadi partai oposisi yang mampu mengimbangi pemerintah SBY. Partai-partai besar yang diharapkan berposisi tidak punya nyali berada di luar kekuasaan. Tinggallah partai PDIP, inilah kekuatan Megawati saat ini yang masih tersisa, sebagai Ketua Umum PDIP ia memilih menjadi penggerak oposisi terhadap pemerintah. Megawati dari kongres ke kongres selalu tak tertandingi, mutlak suara kader menginginkan ia terus menjadi ketua umum partai yang dideklarasikannya itu.

Dari kongres PDIP I yang dilaksanakan di Semarang pada 2000, hingga Kongres PDIP III dilaksanakan pada 2010 di Pulau Dewata Bali, sudah bisa dipastikan sebelumnya bahwa Megawati terpilih kembali sebagai ketua umum partai berlambang banteng tersebut. Kenyataannya memang benar jika sang pendiri partai ini terpilih untuk yang ketiga kalinya menjadi ketua umum periode 2010-2015. Terpilihnya Megawati ini bagi banyak kalangan pengamat politik sebagai langkah mundur sebuah regenerasi partai. Kiranya amat mengherankan ketika kekalahan PDIP pada Pemilu 2004 dan 2009 dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif, Kongres PDIP III justru membulatkan pilihannya kepada Megawati sebagai Ketua Umum PDIP lagi. Walau grafik popularitas partai cenderung menurun, tetap saja dari tingkat elit tokoh partai sampai tingkat pengurusan daerah percaya bahwa Megawati masih cukup mampu memegang kendali partai dan mampu menjadi magnet untuk menarik simpati rakyat Indonesia pada Pemilu 2014 nanti.

Berikut beberapa sorotan dalam kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri di Indonesia:

a. Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di Bidang Ekonomi

Sejak pertama kali dilantik, sistem pemerintahan Presiden Megawati berupaya memberikan kondisi yang kondusif untuk membangun kembali ekonomi yang porak-porandakan sejak terjadinya krisis, pendarahan dan koma

⁴¹ Sumarno, *Megawati Soekarnoputri dari Ibu Rumah Tangga sampai Istana Negara*, 67.

ekonomi-politik sejak 1998 hingga 2001. Empat masalah utama di bidang ekonomi adalah utang jatuh tempo, kas negara yang tidak memadai, masih lemahnya daya beli masyarakat, dan mengembalikan kepercayaan asing kepada Indonesia. Keempat masalah ini membutuhkan penyelesaian segera dan simultan jika tidak ingin Indonesia jatuh ke dalam krisis utang.⁴²

Presiden Megawati berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis energi setelah berhasil meyakinkan banyak pimpinan perusahaan energi dunia untuk melakukan investasi langsung di bidang perminyakan yang berhasil mencapai angka Rp. 200 triliun per tahun. Beberapa proyek raksasa migas juga terus berlangsung hingga tahun 2008 sebagaimana penjelasan Prof. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D yang saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Gotong Royong.⁴³

b. Kepemimpinan Presiden Megawati pada Bidang Politik

Kestabilan pemerintahan Indonesia merupakan hal yang penting saat awal pemerintahan Presiden Megawati. Hal ini diperlukan untuk memantapkan kondisi nasional dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Oleh karena itu, salah satu langkah awal yang diambil oleh Presiden Megawati saat menjabat adalah membangun tatanan politik yang baru melalui amandemen UUD 1945. Selanjutnya, pemerintah melakukan penyesuaian seluruh ketentuan perundang-undangan sesuai dengan amandemen yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pemerintah juga menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang belum dimiliki dalam rangka untuk melengkapi amanat UUD 1945 setelah amandemen.⁴⁴ Beberapa peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

- 1) Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah

⁴² Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, “Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* Volume 11 Nomor 1, (2021): 55.

⁴³ Dahuri, R. dan K. Samah, *The Brave Lady: Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 70.

⁴⁴ Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, “Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004”, 57.

- Konstitusi;
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Partai Politik;
 - 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum;
 - 5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Belajar dari pemerintahan presiden sebelumnya, Presiden Megawati Soekarnoputri lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam UUD 1945.⁴⁵ Presiden Megawati Soekarnoputri juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi berbagai wilayah konflik di Tanah Air seperti: Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat. Dengan kata lain, anggaran presiden ke luar negeri dapat dihemat dan dialokasikan untuk membantu mengurangi penderitaan rakyat di daerah-daerah tersebut, tanpa harus mengabaikan pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi sebagai salah satu aspek penting penyelenggaraan pemerintah yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri. Yang lebih penting, untuk membuktikan kepada rakyat bahwa pemerintahan Megawati Soekarnoputri memiliki *sense of urgency* dan *sense of crisis* yang belum berhasil dibangun pemerintahan sebelumnya.

c. Kepemimpinan Presiden Megawati pada Bidang Sosial

Di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, Kabinet Gotong Royong berhasil menuntaskan konflik sosial hingga peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada di tengah masyarakat, pemerintah melakukan berbagai pendekatan, baik yang bersifat politik, sosial maupun kultural. Berikut adalah beberapa konflik yang berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden

⁴⁵ Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik* (Yogyakarta:

Pustaka Belajar, 2008), 37.

Megawati⁴⁶:

- 1) Penyelesaian Konflik Poso yang telah berlangsung sejak tahun 1998 melalui perjanjian Malino I yang dilaksanakan di Malino selama 15 hari. Perjanjian tersebut dilaksanakan oleh Jusuf Kalla selaku Menko Kesra era Presiden Megawati pada tanggal 20 Desember 2001.
 - 2) Penyelesaian konflik berkepanjangan di Aceh melalui upaya dialog dan perundingan, hingga akhirnya diterapkan darurat militer dan melaksanakan operasi terpadu untuk mengatasi kelompok separatis di Aceh, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
 - 3) Penyelesaian Konflik Ambon, Maluku, melalui perundingan damai. Di mana pemerintah memfasilitasi 5 (lima) kali kegiatan perundingan dengan 2 (dua) kelompok yang berkonflik. Perundingan tersebut menghasilkan Deklarasi Malino II pada tanggal 12 Februari 2002.
 - 4) Pemulihan Pariwisata Pasca Bom Bali melalui 4 (empat) program pemulihan, yaitu: Rescue, Rehabilitasi, Normalisasi dan Ekspansi. Keberhasilan dalam pemulihan pasca BOM Bali dapat mengembalikan kepercayaan dunia kepada pariwisata Indonesia.
 - 5) Penanganan Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia melalui penyusunan kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Hal ini menjadi langkah awal penanganan menyeluruh pemerintah Indonesia terhadap para pahlawan devisa Negara.⁴⁷
- d. Kepemimpinan Presiden Megawati pada Bidang Lingkungan
- Pada bidang lingkungan, pemerintahan Presiden Megawati belajar dari masa lalu terkait kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian memulai beberapa langkah progresif, di antaranya melalui penamaan pulau-pulau di Indonesia yang tak berpenghuni.

⁴⁶ Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, “Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004”, 59.

⁴⁷ Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, “Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004”, 59-60.

Pengarsipan nama-nama pulau kini semakin diwajibkan, dan ide tersebut tentu saja datang dari Presiden Megawati.⁴⁸

e. Kepemimpinan Presiden Megawati pada Bidang Militer

Reformasi nasional dan penciptaan situasi masyarakat yang lebih demokratis memerlukan peran TNI yang dinamis, siap, dan mampu melakukan penyesuaian dengan berbagai perubahan yang ada ini dinyatakan oleh Presiden Megawati sebagai berikut: *“The TNI has pledged its commitment to continue carrying out its internal reforms by way of taking concrete measures to position itself professionally and functionally as the instrument of state defense and to uphold the enforcement of democracy as well as to abide by the law and to respect human rights”*.⁴⁹ Salah satu peran TNI di dalam sistem politik demokratis yang dilakukan Presiden Megawati juga secara khusus memutuskan transfer wewenang pelaksanaan operasi keamanan di Maluku dari tangan Polisi ke tangan TNI yang terbukti efektif untuk memulihkan stabilitas keamanan pada tahun 2002.

Pada masa pemerintahannya, Presiden Megawati berusaha menarik lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan untuk membantu TNI dalam menghadapi ancaman non-militer. TNI juga diberikan empat tugas pokok yakni mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia secara regional maupun internasional.⁵⁰

Berbagai kebijakan dan keberhasilan pada kepemimpinan Presiden Megawati, masih ada catatan kurang memuaskan di antaranya yakni dalam bidang hukum. Meskipun menindak tegas para pengedar narkoba, Tetapi pada masa pemerintahannya belum mampu menyeret para petinggi Orde Baru yang terindikasi korupsi ke meja pengadilan. Semboyan yang paling sering dilontarkan Megawati bahwa ia membela wong cilik, tetapi pada saat Megawati sendiri memerintah negeri ini tetap saja ada

⁴⁸ Dahuri, R. dan K. Samah, *The Brave Lady: Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong*, 76.

⁴⁹ Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, *“Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004”*, 61-62.

⁵⁰ Dahuri, R. dan K. Samah, *The Brave Lady: Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong*, 81.

banyak kasus penggusuran terhadap pemukiman penduduk dan para pedagang kecil seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Megawati belum mampu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rezim Orde Baru. Selain itu maraknya teror dan ledakan bom yang terjadi di sejumlah daerah membuat pemerintahan Megawati tersudut karena tidak mampu memberikan rasa aman kepada rakyatnya.⁵¹



⁵¹ Sirojudin, “Peran Oposisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono-Yusuf Kalla” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2006), 34.